

## **POLITIK IDENTITAS DALAM KAMPANYE POLITIK ETIK-SAPTO MENJELANG PILKADA 2024**

### ***IDENTITY POLITICS IN POLITICAL CAMPAIGNS BY ETIK-SAPTO AHEAD OF THE 2024 ELECTIONS***

**Aisyah Diah Nurmastuti<sup>1</sup>, Nur Muhammad Amin Yahya<sup>2</sup>, Haniyyah Isnaini<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Email: [dwimastuti4@gmail.com](mailto:dwimastuti4@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Email: [aminyahya@gmail.com](mailto:aminyahya@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Email: [haniyyahisnaini@gmail.com](mailto:haniyyahisnaini@gmail.com)

#### **Abstrak**

Fenomena politik identitas kembali menarik perhatian menjelang Pilkada 2024 di Indonesia, di mana mobilisasi dukungan berdasarkan kesamaan etnis, agama, atau kelompok tertentu berpotensi mempengaruhi dinamika pemilihan umum. Dalam konteks ini, media sosial, khususnya Instagram, memegang peranan penting dalam penyebaran kampanye yang menekankan politik identitas, sering kali mengabaikan isu substantif yang seharusnya menjadi fokus utama pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan politik identitas dalam kampanye calon pemimpin, dengan fokus pada Etik-Sapto dari PDI-P. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana konten yang menampilkan isu identitas dapat memperkuat polarisasi di masyarakat serta menjadi tantangan bagi integritas demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun politik identitas dapat meningkatkan dukungan pemilih, dampaknya terhadap keharmonisan sosial dan pluralisme di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius.

**Kata kunci** : Politik identitas , Media, dan Islam.

#### **Abstract**

*The phenomenon of identity politics is again attracting attention ahead of the 2024 regional elections in Indonesia, where the mobilization of support based on similarities in ethnicity, religion or certain groups has the potential to influence the dynamics of general elections. In this context, social media, especially Instagram, plays an important role in the spread of campaigns that emphasize identity politics, often ignoring substantive issues that should be the main focus of voters. This research aims to analyze the use of identity politics in the campaign for leadership candidates, with a focus on the PDI-P's Etik-Sapto. Through a qualitative descriptive approach, this research explores how content that displays identity issues can strengthen polarization in society and pose a challenge to the integrity of democracy. The research results show that although identity politics can increase voter support, its impact on social harmony and pluralism in Indonesia needs serious attention.*

**Keyword** : Identity politics, Media, and Islam.

## PENDAHULUAN

Pasangan calon untuk posisi bupati dan wakil bupati Sukoharjo, Etik Suryani dan Eko Sapto Purnomo, adalah kandidat yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam pemilihan kepala daerah Sukoharjo 2024. Etik Suryani dikenal sebagai sosok yang berpengalaman di pemerintahan daerah serta aktif dalam berbagai aktivitas sosial, sedangkan Eko Sapto Purnomo memiliki latar belakang yang mendalam di sektor pemerintahan dan pembangunan lokal. Kombinasi keduanya diharapkan dapat menghadirkan perubahan yang positif dan perkembangan bagi Kabupaten Sukoharjo.

Dukungan untuk duet Etik-Sapto tidak hanya berasal dari PDI-P, tetapi juga melibatkan koalisi besar yang terdiri dari tujuh partai politik utama, yaitu Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PKB, dan NasDem. Koalisi ini mencerminkan kekuatan politik yang solid dan memberikan dukungan yang berarti bagi calon tersebut. Dengan dukungan lintas partai ini, Etik-Sapto kini menjadi calon tunggal dalam Pilkada Sukoharjo 2024, menempatkan mereka dalam posisi strategis untuk meraih kemenangan.

Menjadi calon tunggal memberikan keuntungan tersendiri bagi Etik-Sapto, karena mereka dapat lebih fokus pada pengembangan program dan taktik kampanye tanpa harus berhadapan dengan pesaing lain. Target kemenangan yang mereka miliki didukung oleh jaringan partai yang luas serta basis pemilih yang kuat. Hal ini menjadikan Pilkada Sukoharjo 2024 sebagai kesempatan penting bagi Etik-Sapto untuk mewujudkan visi mereka dalam membangun Sukoharjo yang lebih maju, adil, dan bermartabat.

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, fenomena politik identitas kembali menjadi fokus utama dalam konteks kampanye politik di Indonesia. Politik identitas, yang merujuk pada pergerakan dukungan berdasarkan kesamaan etnis, agama, atau kelompok tertentu, telah terbukti berpengaruh terhadap dinamika pemilihan umum. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan strategi ini semakin meningkat, menciptakan polarisasi di masyarakat dan menimbulkan tantangan bagi integritas demokrasi (Aidah et al., 2023).

Media sosial, terutama Instagram, berperan signifikan dalam penyebaran politik identitas. Platform ini memberikan kesempatan calon pemimpin untuk membangun citra dan menarik dukungan dari kelompok-kelompok tertentu melalui konten yang disesuaikan dengan nilai dan keyakinan mereka. Dengan demikian, tercipta ruang bagi narasi yang dapat memperdalam perpecahan di antara masyarakat (Prasetia, 2019).

Kampanye yang mengedepankan politik identitas sering kali mengabaikan isu-isu substantif yang seharusnya menjadi fokus utama pemilih. Sebagai contoh, calon yang lebih menekankan pada perbedaan identitas daripada visi dan misi program dapat mengalihkan perhatian pemilih dari pertanyaan kritis mengenai kebijakan publik. Ini berpotensi merugikan kualitas demokrasi dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan pemilih (Tutukansa, 2022).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan organisasi masyarakatan seperti Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah telah mengingatkan tentang bahaya politik identitas. Mereka menyerukan agar para calon pemimpin tidak menggunakan strategi ini sebagai alat untuk meraih suara, melainkan lebih kepada pendekatan yang inklusif dan berbasis pada kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Tantangan dalam mengatasi politik identitas juga terletak pada kurangnya definisi yang jelas dalam regulasi pemilu. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memberikan penjelasan mendetail mengenai apa yang dimaksud dengan politik identitas, sehingga membuka peluang bagi penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu.

Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kritis terhadap kampanye yang menggunakan politik identitas. Pemilih diharapkan dapat membedakan antara kampanye yang berbasis gagasan dengan yang hanya mengandalkan perbedaan identitas semata. Dengan demikian, proses demokrasi dapat berlangsung lebih sehat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, menjelang Pilkada 2024, perhatian terhadap politik identitas sangatlah penting untuk menjaga keutuhan sosial dan harmoni di masyarakat. Upaya pencegahan harus dilakukan secara kolektif oleh semua elemen masyarakat agar pemilu tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar calon tetapi juga

sebagai sarana untuk memperkuat persatuan bangsa.

Dalam Penelitian ini menggunakan referensi dari beberapa jurnal untuk mengetahui perbedaannya, antara lain artikel yang dibuat oleh Davena Rasyafa Azzura yang berjudul; *“Konstruksi Politik Identitas Dalam Kampanye Politik Melalui Media Sosial Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2024”*, Universitas Padjajaran. Dalam Jurnal ini Kampanye melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Youtube memperlihatkan interaksi langsung dengan masyarakat, yang memungkinkan terbentuknya politik identitas berdasarkan agama, etnisitas, dan visi misi politik (Azzura, 2024).

Jurnal yang dibuat oleh Alexander dkk, yang berjudul; *“Politik Identitas, Ancaman Demokrasi dan Ketahanan Nasional Jelang Pilpres 2024”*, Universitas Indonesia. Dalam jurnal ini Penggunaan politik identitas pernah begitu terasa ketika pemilihan gubernur DKI beberapa tahun lalu, Indonesia tentu uteras, mengalami pendewasaan demokrasi dan tak ingin terulang (Apriando et al., 2023) .

penelitian yang dilakukan oleh Maghfira Faraidiany, Heri Kusmanto & Warijo tahun 2019, dengan judul artikel *“Politik Identitas dalam Iklan Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2018.”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu politik identitas masih dapat dilihat dari iklan kedua pasang kandidat dan mereka menggunakan isu identitas untuk menaikkan dukungan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah, penelitian terdahulu menganalisis adanya politik dalam iklan politik pada pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2018 (Faraidiany et al., 2019) .

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan proses politik dari waktu ke waktu dalam konteks yang alami dan tanpa rekayasa, serta berlandaskan pada paradigma ilmiah. Pendekatan ini menekankan pada upaya menemukan pengetahuan baru yang belum terdapat dalam teori-teori sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis konten yang menampilkan Etik- Spto, yang pada Pilkada Sukoharjo terlibat dalam politik identitas, baik melalui tayangan adzan maupun berbagai konten politik

identitas lainnya di media sosial.

Subjek penelitian ini adalah Etik- Sapto, seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang mencalonkan diri dalam Pilkada 2024. Penelitian dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dan mendalam konten media sosial yang menampilkan kampanye politik identitas yang dilakukan oleh Etik- Sapto. Hal ini termasuk observasi audiovisual, yaitu pengamatan langsung terhadap materi yang dipublikasikan oleh Etik- Sapto menjelang Pilkada 2024 yang melibatkan isu-isu identitas tertentu dalam pesan kampanyenya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Politik identitas merupakan fenomena sosial yang semakin mendapatkan perhatian di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Konsep ini merujuk pada cara individu atau kelompok membangun identitas mereka berdasarkan ciri-ciri tertentu, seperti agama, ras, etnis, atau gender. Dalam konteks Indonesia, di mana keberagaman budaya dan agama sangat kental, politik identitas sering kali menjadi alat untuk mobilisasi sosial dan politik. Salah satu agama yang paling berpengaruh di Indonesia adalah Islam, yang merupakan agama mayoritas di negara ini (Yusuf & Hidayah, 2024).

Dalam pemilihan kepala daerah Sukoharjo 2024, pasangan calon Etik-Sapto memanfaatkan politik identitas sebagai salah satu cara untuk menarik perhatian masyarakat. Pendekatan ini terlihat jelas dari penekanan yang mereka berikan pada nilai-nilai keagamaan dan kultur yang menjadi karakteristik masyarakat Sukoharjo. Dengan demikian, mereka berupaya menciptakan koneksi emosional dengan pemilih yang merasakan adanya kesamaan identitas, baik dalam hal agama maupun budaya setempat (Triana & Liska, 2020).

Visi yang diusung oleh Etik-Sapto, yang bertajuk "Sukoharjo Lebih Maju, Adil dan Bermartabat," tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik atau peningkatan ekonomi, tetapi juga pada pengembangan kualitas sumber daya manusia serta keadilan dalam pembangunan. Mereka memberikan perhatian khusus pada pentingnya pelestarian dan penguatan identitas budaya serta nilai-nilai religius masyarakat sebagai bagian dari usaha menciptakan daerah yang seimbang dan

bermartabat. Ini juga menjadi daya tarik bagi pemilih yang ingin dipimpin oleh sosok yang memahami dan menghargai nilai-nilai lokal.

Media sosial, khususnya Instagram, berfungsi sebagai saluran utama untuk menyebarkan pesan-pesan kampanye yang mengangkat tema identitas tersebut. Dengan konten visual dan cerita yang menarik, Etik-Sapto mampu menjangkau berbagai kelompok pemilih secara cepat dan luas. Namun, pemanfaatan politik identitas di media sosial bisa membawa risiko, seperti memperkuat perpecahan dan polarisasi di masyarakat ketika pesan yang dikirimkan terlalu menekankan perbedaan antar kelompok (Judijanto et al., 2024).

Meskipun politik identitas dapat meningkatkan dukungan dari beberapa kelompok, penting untuk diingat bahwa kampanye juga harus berfokus pada isu-isu pokok yang mengaitkan kesejahteraan semua anggota masyarakat. Jika tidak dikelola dengan baik, politik identitas dapat membagi masyarakat dan mengganggu kedamaian sosial. Oleh karena itu, pasangan calon dan tim pendukungnya harus bijaksana dalam menerapkan strategi ini agar pemilihan umum dapat berlangsung dengan aman dan demokratis (Prasetia, 2019).

Islam tidak hanya menjadi landasan spiritual bagi umatnya, tetapi juga berfungsi sebagai identitas kolektif yang dapat mempengaruhi perilaku politik. Dalam konteks kampanye politik, penggunaan identitas Islam dapat menjadi strategi yang efektif untuk menarik dukungan dari pemilih yang mayoritas beragama Islam. Politisi sering kali memanfaatkan simbol-simbol agama, nilai-nilai, dan narasi yang berhubungan dengan Islam untuk membangun koneksi emosional dengan pemilih (Muthohirin, 2019).

Media juga memiliki peran penting dalam dinamika politik identitas ini. Di era digital, platform-platform seperti Instagram, baleho, dan berita online berfungsi sebagai alat utama untuk menyebarkan pesan serta kampanye. Instagram, dengan daya tarik visualnya yang kuat, memberikan kesempatan bagi para politisi untuk memperlihatkan citra diri yang selaras dengan identitas Islam yang ingin mereka tonjolkan. Baleho, yang merupakan media luar ruang, sering kali dijadikan lokasi strategis untuk menampilkan slogan-slogan yang mengaitkan kandidat dengan nilai-nilai agama. Sementara itu, berita online menawarkan ruang untuk diskusi dan

debat tentang isu-isu yang relevan, termasuk pemanfaatan identitas agama dalam politik (Fahruji & Fahrudin, 2023).

Penggunaan identitas Islam dalam kampanye politik tidak hanya melalui strategi, tetapi juga mencerminkan realitas sosial di mana agama memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat. Pemilih yang beragama Islam mungkin lebih cenderung memilih kandidat yang mereka anggap mewakili nilai-nilai agama mereka. Maka dari itu, analisis terhadap fenomena ini menjadi sangat penting. Menganalisis bagaimana identitas Islam digunakan dalam kampanye politik dapat memberikan wawasan tentang dinamika sosial dan politik yang lebih luas (Judijanto et al., 2024).

Media sosial, khususnya Instagram, memiliki peran krusial dalam penyebaran kampanye politik identitas yang dilakukan oleh pasangan calon seperti Etik-Sapto. Platform ini memfasilitasi penyebaran pesan kampanye yang menekankan pada nilai-nilai terhadap keagamaan dan identitas budaya dengan cara yang cepat dan luas, serta menjangkau berbagai kelompok pemilih secara efektif. Melalui visual yang menarik dan narasi yang mudah dimengerti dan dipahami, politik identitas dapat diperkuat, sehingga dapat meningkatkan dukungan dari kelompok yang merasa terwakili. Namun, penggunaan media sosial yang intens dalam konteks politik identitas juga dapat memperburuk polarisasi di masyarakat jika pesan yang disampaikan lebih menonjolkan perbedaan daripada kesamaan (Fajri et al., 2024).

Selain itu, media massa tradisional juga berperan dalam dinamika politik identitas. Media massa dapat berfungsi sebagai ruang publik untuk dialog produktif yang dapat memperluas pemahaman masyarakat dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta keberagaman. Dengan penyampaian berita yang seimbang dan bertanggung jawab, media massa bisa membantu menurunkan ketegangan dalam sosial yang mungkin muncul akibat politik identitas. Namun, jika pemberitaan tidak dikelola dengan baik, terutama dalam mengangkat isu-isu sensitif terkait identitas, media massa berisiko memperburuk konflik dan memperdalam perpecahan di dalam antar masyarakat (Ritonga, 2023).

Oleh sebab itu, baik media sosial maupun media massa perlu menjalankan

fungsi mereka secara hati-hati dalam konteks kampanye politik identitas. Media harus memastikan bahwa berita dan konten yang disampaikan tidak memperburuk polarisasi, tetapi justru mendorong dialog yang inklusif dan memperkuat persatuan. Dalam Pilkada 2024, khususnya dalam kampanye Etik-Sapto yang menekankan politik identitas, pengelolaan media yang bijak menjadi kunci untuk menjaga integritas demokrasi dan keharmonisan sosial di Sukoharjo serta Indonesia secara keseluruhan (Ahmad Salman Farid, 2023).

Dalam menganalisis penggunaan identitas agama dalam kampanye, beberapa pendekatan dapat diambil. Pertama, analisis konten dapat digunakan untuk mengkaji materi kampanye yang disebarakan melalui media. Ini termasuk mengevaluasi pesan yang disampaikan, simbol-simbol yang digunakan, dan bagaimana semua ini beresonansi dengan audiens. Kedua, survei dan studi lapangan dapat membantu memahami persepsi pemilih terhadap penggunaan identitas Islam dalam kampanye. Ketiga, pendekatan kualitatif, seperti wawancara mendalam, dapat memberikan gambaran yang lebih kaya tentang motivasi dan sikap pemilih terhadap isu ini.

Dengan memahami hubungan antara politik identitas, Islam, dan media, kita dapat lebih mengapresiasi kompleksitas dinamika politik di Indonesia. Hal ini juga membuka ruang untuk diskusi tentang bagaimana identitas dapat dibentuk dan dinamis dalam konteks sosial yang beragam. Melalui analisis yang mendalam, kita dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan identitas agama dalam politik, serta implikasinya bagi masa depan demokrasi di Indonesia.

## **SIMPULAN**

Penggunaan politik identitas berbasis agama, khususnya Islam, dalam pemilu di Indonesia menunjukkan dinamika sosial yang kompleks. Politisi sering memanfaatkan simbol-simbol agama dan nilai-nilai keislaman untuk menarik dukungan pemilih, menciptakan kedekatan emosional yang kuat. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim, strategi ini cukup efektif karena Islam memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Media



digital, terutama platform seperti Instagram, Twitter, dan portal berita online, semakin mempermudah politisi dalam menyebarkan pesan-pesan ini, menciptakan narasi yang cepat dan luas, serta memperkuat pengaruh mereka dengan visual dan pesan yang menggugah sentimen religius. Hal ini memungkinkan kampanye berbasis identitas agama untuk lebih menyentuh sisi pribadi dan emosional pemilih, yang pada gilirannya bisa memobilisasi suara secara signifikan.

Namun, penggunaan politik identitas ini juga menghadirkan sejumlah tantangan serius. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya polarisasi sosial dan potensi intoleransi antar kelompok. Ketika identitas agama dijadikan alat untuk meraih dukungan, hal itu bisa memperburuk perbedaan antara kelompok mayoritas dan minoritas, menciptakan ketegangan yang merusak keharmonisan sosial. Indonesia sebagai negara plural dengan beragam suku, agama, dan budaya rentan terhadap dampak negatif dari politik identitas ini. Dalam beberapa pemilu sebelumnya, kita telah melihat bagaimana sentimen agama bisa dimanfaatkan untuk memecah belah masyarakat, memperburuk hubungan antar umat beragama, dan merusak kebersamaan yang selama ini dijaga. Polaritas ini juga memperburuk kecenderungan untuk melihat perbedaan sebagai ancaman, bukannya kekayaan yang memperkaya kehidupan berbangsa.

Fenomena politik berdasarkan identitas yang terlihat dalam kampanye Pilkada 2024, khususnya pada pasangan Etik-Sapto di Sukoharjo, mengindikasikan bahwa strategi yang menggerakkan orang berdasarkan kesamaan etnis, agama, atau kelompok tertentu masih efektif dalam menarik dukungan dari pemilih. Pemanfaatan identitas sebagai daya tarik dalam politik memang bisa memperkuat dukungan, tetapi hal ini juga berpotensi meningkatkan polarisasi di masyarakat jika tidak disertai dengan narasi yang inklusif serta program yang memperhatikan kebutuhan semua lapisan masyarakat.

Media sosial, terutama Instagram, memainkan peran penting dalam menyebarkan pesan-pesan politik identitas. Platform ini memudahkan para kandidat untuk membangun reputasi dan menjangkau kelompok target melalui konten yang menekankan nilai-nilai agama dan budaya lokal. Namun, tingginya penggunaan media sosial dalam kampanye identitas dapat mempercepat

penyebaran narasi yang dapat memecah belah masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan literasi digital dan kesadaran kritis dari masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang bersifat sektarian.

Dampak dari politik identitas tidak hanya dirasakan dalam aspek pemilu, tetapi juga memengaruhi keharmonisan sosial dan keberagaman di Indonesia. Jika politik identitas dipraktikkan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan isu-isu yang lebih mendalam, proses demokrasi dapat terganggu dan kualitas pemilu menjadi menurun. Oleh sebab itu, pengawasan dari lembaga seperti Bawaslu dan organisasi masyarakat sangat penting untuk memastikan kampanye berjalan secara etis dan tidak memicu perpecahan.

Dampak jangka panjang dari politik identitas berbasis agama terhadap demokrasi dan pluralisme di Indonesia sangat signifikan. Demokrasi yang seharusnya mengedepankan inklusivitas dan kebhinekaan bisa terancam jika politik identitas ini terus dibiarkan berkembang tanpa batas. Ketika identitas agama digunakan untuk mengusung kepentingan kelompok tertentu, hal itu bisa mengabaikan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, penting bagi politisi dan masyarakat untuk bijaksana dalam menyikapi politik identitas, dengan memastikan bahwa perjuangan berdasarkan agama tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan pluralisme. Pengelolaan politik identitas yang adil dan terbuka sangat diperlukan untuk menjaga kedamaian, persatuan, dan keberagaman Indonesia. Secara keseluruhan, tantangan utama ke depan adalah bagaimana menyeimbangkan pengakuan identitas kelompok dengan upaya untuk memperkuat persatuan nasional. Para kandidat dan tim kampanye perlu lebih bijaksana dalam menggunakan isu identitas, dengan tetap memprioritaskan visi, misi, dan program yang inklusif. Hanya dengan cara ini, Pilkada 2024 dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat demokrasi dan menjaga harmoni sosial di tengah keragaman bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Salman Farid. (2023). Peran Media Massa Dalam Memoderasi Dialog Politik. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 151–161. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.343>
- Aidah, N. L., Rochmadian, S., Maliha, U., Sunan, U., Surabaya, A., & Abstrak, K. K. (2023). Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Politik Identitas Dalam Pemilu dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia. *Mei*, 3(1), 1–20.
- Apriando, A., Ridho Akustyo, B., Miardi, M., Martha Agustina, S., Akustyo, R., & Martha, S. (2023). Politik Identitas, Ancaman Demokrasi dan Ketahanan Nasional Jelang Pilpres 2024. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i1.10075>
- Azzura, D. R. (2024). 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Konstruksi Politik Identitas Dalam Kampanye Politik Melalui Media Sosial Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2024 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 2(9), 604–610.
- Fahruji, D., & Fahrudin, A. (2023). Pemanfaatan Media Sosial dalam Kampanye Politik Menjelang Pemilu 2024: Studi Kasus tentang Akun Media Sosial Partai Politik dan Politisi. *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan)*, 6(2), 118–132. <https://doi.org/10.31949/jika.v6i2.6675>
- Fajri, N., Fajri, R., & Sulisawati, N. (2024). Transformasi Politik Di Indonesia: Analisis Terhadap Peran Media Sosial Dalam Partisipasi Politik Generasi Muda. *Online) Journal of Political Sphere* /, 5(1), 2746–1947. <https://doi.org/10.24815/jps.v5i1.39517>
- Faraidiany, M., Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Politik Identitas dalam Iklan Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2018. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 113. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i1.12310>
- Judijanto, L., Wandan, H., Ayu, N., & Triyantoro, A. (2024). Pengaruh Politik Identitas dan Penggunaan Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Digital Pemilih Milenial dan Gen Z di Indonesia. 2(01), 24–35.

<https://doi.org/10.58812/sish.v2.i01>

- Muthohirin, N. (2019). Politik Identitas Islam dan Urgensi Pendidikan Multikultural. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 47–56. <https://doi.org/10.18860/jpai.v6i1.8776>
- Prasetia, A. R. (2019). Influence of identity politics through social media towards the millennial generation and implementation of elections. *Conference On Communication and News Media Studies*, 1, 29–30. <https://proceeding.umn.ac.id/index.php/COMNEWS/article/view/1077>
- Ritonga, R. S. (2023). Media dan Politik. *Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah*, 1(1), 64–89. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/ittishol/article/view/11057>
- Triana, R., & Liska, R. (2020). Politik Identitas: Apakah Politik Identitas Akan Mempengaruhi Popularitas? (Kajian Politik Identitas Dalam Pilkada Kalteng). *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, VIII(2), 163–171.
- Tutukansa, A. F. (2022). Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 14(1), 20–30. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol14.iss1.art3>
- Yusuf, T., & Hidayah, M. (2024). Islam Dan Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024. *Asketik*, 7(2), 267–283. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1163>